



LAPORAN TEMATIK

Workshop Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Sulawesi Utara

Manado, 4 Oktober 2016



Workshop Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Sulawesi Utara

Tema :

“Konservasi dan Tantangannya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Sulawesi Utara”

1. LATAR BELAKANG & TUJUAN

Berdasarkan profil ekosistem Wallacea¹, Sulawesi Utara merupakan daerah penting bagi keanekaragaman hayati. Setidaknya ada 12 lokasi yang menjadi daerah penting bagi keanekaragaman pesisir dan laut. Namun demikian, apakah kawasan pesisir dan laut sudah dikelola dengan baik?

Hingga saat ini, semua potensi perikanan dan kelautan tersebut belum dikelola dengan baik dalam upaya penyejahteraan masyarakat sekitar kawasan pesisir tersebut. Berbagai kendala dan tantangan dihadapi di wilayah Sulawesi Utara, termasuk diantaranya *illegal fishing*, pencemaran laut, maupun *destructive fishing*. Ditambah lagi dengan degradasi kawasan pesisir, semisal berkurangnya mangrove, padang lamun, maupun rusaknya terumbu karang. Proyek Pesisir yang dicanangkan pada tahun 2000an belum sepenuhnya diterapkan secara berkelanjutan di desa-desa target, hal ini dimungkinkan belum kuatnya manajemen di tingkat desa dimana program tersebut dilaksanakan. Keberlanjutan merupakan bagian penting untuk diperkuat sebelum proyek berakhir sehingga masyarakat desa menjadi berdaya, termasuk bagaimana memperkuat jaringan dengan pihak lain.

CEPF Wallacea dan Burung Indonesia memiliki perhatian serius di Sulawesi Utara sebagai bagian penting dari *Key Biodiversity Area* (KBA). Yapeka sebagai salah satu lembaga yang bergerak pada isu pesisir di wilayah Sulawesi Utara dipercaya oleh CEPF Wallacea dan Burung Indonesia untuk mendorong sinergitas kegiatan konservasi secara khusus pesisir dan laut melalui serangkaian workshop. Workshop dengan tema “*Konservasi dan Tantangannya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Sulawesi Utara*”. Tujuan kegiatan tersebut untuk mendapatkan gambaran faktual dan informatif mengenai kebijakan, program, serta tantangan dalam pengelolaan pesisir dan laut oleh Pemerintah Daerah, Universitas, Konsorsium Mitra Bahari, dan LSM.

2. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan adalah:

1. Diperolehnya gambaran faktual dan informasi tentang dukungan kebijakan Pemerintah, peran Universitas, Konsorsium Mitra Bahari Sulawesi Utara (lembaga kemitraan pesisir & laut), dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Sulawesi Utara
2. Adanya input dari para pihak dalam menyusun langkah-langkah strategis dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Sulawesi Utara ke depannya ;

3. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

¹ Profile Ekosistem Wallacea. Disusun oleh konsorsium yang dipimpin oleh Burung Indonesia dengan dukungan dari *Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)*

Kegiatan *workshop* ini dilaksanakan pada :

- Hari/tanggal : Selasa, 4 Oktober 2016
- Waktu : 08.30 – Selesai
- Tempat : Hotel Whiz Prime Megamas Manado
Jl. Piere Tendeau Boulevard, Manado, Sulawesi Utara

4. NARASUMBER

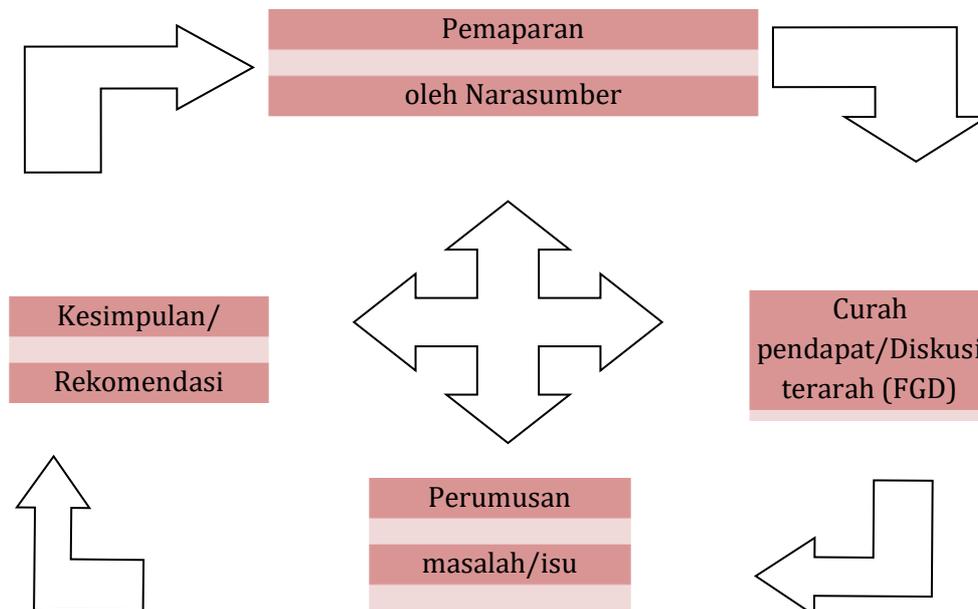
Kegiatan ini didukung oleh narasumber dari :

1. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara
2. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi
3. Mitra Bahari Sulawesi Utara
4. Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (Perkumpulan Yapeka)

5. PROSES PELAKSANAAN WORKSHOP

5.1. Alur proses

Alur proses seperti berikut:



5.2. Diskusi.

Fasilitator akan mengantar dan memandu formulasi bahasan dan identifikasi informasi & pengalaman, peran para pihak dan wilayah kerja, tantangan dan pokok-pokok pikiran dalam alur diskusi yang partisipatif berdasarkan materi yang dipaparkan oleh para narasumber.

5.3. Perumusan masalah/isu.

Pada tahapan ini, Fasilitator bersama tim perumus akan memformulasi rumusan bagaimana program pesisir dan laut yang telah berjalan dan apa faktor pendukungnya serta program pesisir dan laut yang tidak berjalan dan apa permasalahannya/tantangannya. Rumusan ini akan dibahas secara terfokus oleh pada peserta melalui *Focus Group Discussion (FGD)*. FGD dibagi 2 kelompok sesuai letak geografi dan isu yang akan diangkat dan masing-masing kelompok memaparkan hasil FGD.

5.4. Kesimpulan/Rekomendasi.

Fasilitator akan memfasilitasi lahirnya rekomendasi dan mengurai rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh para pihak

6. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksana kegiatan ini adalah Perkumpulan YAPEKA yang didukung oleh Burung Indonesia, Program Wallacea dan CEPF.

7. PESERTA

Kegiatan ini diikuti oleh 36 peserta yang berasal dari Pemerintah Daerah (DKP, BPMPD, BAPPEDA) , Universitas, LSM, perwakilan masyarakat, dan media. (Daftar hadir terlampir)



Photo 1 Pembukaan oleh DKP Provinsi dan Burung Indonesia/CEPF



Photo 2 Peserta Workshop Pengelolaan Pesisir dan Laut di Sulawesi Utara

8. PROSES WORKSHOP

Sesi pertama dibuka dengan sambutan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Pesan penting dari sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara adalah bahwa sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu penyumbang devisa negara apabila dikelola dengan baik; perlunya integrasi semua pihak; pelaksanaan kegiatan kelautan dan perikanan yang harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku; masih adanya kegiatan yang merusak lingkungan pesisir dan laut antara lain pencemaran, penambangan karang, pengambulan mangrove, penangkapan ikan dilindungi, dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab, penggunaan bom dan racun serta listrik; saat ini Pemerintah Provinsi Sulut telah melakukan kebijakan pengelolaan wilayah melalui penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3); dan bahwa Pemerintah juga tetap memperhatikan masyarakat yang secara sukarela melakukan pelestarian sumber daya kelautan.

Setelah sambutan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari 4 (empat) narasumber dari DKP Provinsi Sulawesi Utara, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi (FPIK Unsrat), Konsorsium Mitra Bahari Sulawesi Utara, dan Yapeka. Materi dan diskusi yang disampaikan oleh para narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Beberapa poin dalam pemaparan materi oleh narasumber :

Sesi 1

- 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara (Drs. Roy Robert (Perwakilan DKP) :**

Topik : Dukungan Kebijakan dan Pelaksanaan Program Pesisir dan Laut di Sulawesi Utara Pasca UU No.23 Tahun 2014.

Catatan Materi :

- ✓ Konservasi tidak hanya bicara larangan kepada masyarakat untuk tidak melakukan ini dan itu, namun harus memberikan alternative bagi mereka ketika mereka telah andil dalam menjaga lingkungan;
- ✓ Setiap orang bisa memanfaatkan wilayah pesisir tapi harus ada izinnnya. Saat ini, perorangan ada yang memanfaatkan orang berpengaruh untuk kegiatan di wilayah pesisir namun secara aturan kegiatan tersebut tanpa ijin. Contohnya penimbunan pantai;
- ✓ Kewenangan menurut UU No. 23 tahun 2014 bahwa dahulu Kabupaten/Kota mengelola 1/3 wilayah perairan. Namun saat ini, pengelolaan wilayah perairan sudah menjadi kewenangan provinsi. Oleh karena itu, tujuan pengelolaan wilayah laut harus diatur dengan baik karena jika dikelola dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat dan perubahan yang baik;
- ✓ Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir/laut di Sulawesi Utara sudah ada dalam bentuk draft RZWP3K, namun belum disetujui hingga saat ini dan belum diterbitkan menjadi dokumen public.

2. Konsorsium Mitra Bahari Sulawesi Utara (Dr. Joy Ch. Kumaat, S,Pi., M.Sc)

Topik : Peran Mitra Bahari dan Pembelajaran Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Kemitraan di Sulawesi Utara

Catatan Materi :

- ✓ Saat ini, konservasi menjadi corong utama yang harus didengungkan, salah satunya melalui guru
- ✓ Perhatian keilmuan pesisir/laut tertuju pada *maritim science*. Laut dan maritim Indonesia hebat dan diakui dunia. Namun tidak seimbang dengan pelajaran *maritime science* yang seharusnya sudah mulai diperkenalkan sejak di sekolah tingkat dasar.
- ✓ Kondisi yang terjadi salah satunya belum meratanya pendidikan di indonesia. Ketidak hadirannya gurupun menjadi masalah, sehingga perlunya melibatkan komunitas dan masyarakat sipil setempat dalam menyampaikan pelayanan pendidikan
- ✓ Konsorsium Mitra Bahari, merupakan tempat berkumpul stakeholder. Dengan mengangkat isu-isu strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, misalnya (*common properties*, degradasi lingkungan, kemiskinan dan berusaha mencari solusi (teknologi, peraturan dan kebijakan) yang dapat diterapkan
- ✓ Reklamasi menjadi isu yang hangat, termasuk di Sulawesi Utara. Apakah benar reklamasi merusak lingkungan? Benar atau tidak kita kaji sama-sama.
- ✓ Selain itu, Pulau Bangka merupakan isu sensitif, secara tidak langsung, karena di wilayah tersebut merupakan kawasan wisata, di satu sisi pertambangan masih terjadi.
- ✓ Berhadapan dengan laut dibutuhkan keberanian, kecerdasan, ketekunan, dan ketepatan dan saat ini generasi muda masih banyak yang optimis dengan pengelolaan lingkungan

Diskusi

Catatan Diskusi :

- Salah satu permasalahan konservasi adalah pendidikan. Satu yang di lupakan adalah pendidikan kearifan lokal. Dengan konsep yang masyarakat buat bisa menjadi stimulus kepada segenap pihak. Apalagi konsepnya dapat dimengerti oleh masyarakat. Konsep-konsep konservasi harus dimengerti oleh masyarakat dan masyarakat juga dilibatkan untuk membuat konsep konservasi. Ada kearifan lokal yang bisa dikaji lebih lanjut di luar pendidikan formal
- Isu reklamasi sudah menjadi isu nasional. Reklamasi dari sisi ekonomi sangat bermanfaat namun disisi lain perlu memperhatikan isu lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dari sisi ekonomi dan lingkungannya
- Sebagai contoh program pengelolaan hutan mangrove dapat memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai manfaat mangrove. Dalam program tersebut juga dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam memanfaatkan mangrove.

Sesi 2.

1. Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA) (Akbar A. Digdo)

Topik : Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Desa : pembelajaran sebagai penerima Hibah CEPF di Sulawesi Utara

Catatan Materi :

- Yapeka merupakan sebuah perkumpulan yang berbasis di Bogor yang berkegiatan di beberapa tempat di Indonesia antara lain di Sulut, Riau, NTB, NTT, dan lainnya.
- Dua pilar utama Yapeka yaitu pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan komunitas dalam konteks konservasi. Desa pesisir terdapat ekosistem pesisir dan masyarakat yang bergantung pada ekosistem untuk terus hidup.
- Saat ini, paradigma yang mulai bergeser, dahulu desa itu dipandang perlu dibangun. Masyarakat sebetulnya punya keinginan untuk lebih baik dan sekarang sudah ada UU Desa yang memberikan ruang terhadap desa dan masyarakat. Sudah seharusnya konservasi di desa mengikuti keinginan lokal.
- Perlu mempertimbangkan apa yang terjadi di desa, bagaimana kapasitas di desa. Desa juga berhak menentukan perencanaan desa namun juga wajib untuk mengelolanya sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- Permasalahan konservasi harus dikontekskan ke tingkat desa. Upaya yang dapat dilakukan melalui asistensi kebijakan dan peningkatan kapasitas. Bagi LSM/NGO yang akan melakukan kegiatan di desa perlu menyesuaikan sudut pandangnya.
- Penyusunan tata ruang desa menjadi *entry point*.
- Saat ini, berdasarkan UU Desa, RPJMDes dibagi menjadi bidang-bidang, disesuaikan dengan kondisi desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- Fokus kegiatan ke depan di perdesaan, konteks konservasi harus dipahami oleh masyarakat tentang bagaimana internalisasi isu-isu pengelolaan ke dalam perencanaan desa tersebut

2. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi (Prof. Farnis B. Boneka)

Topik : Efektivitas Konservasi Pesisir dan Laut di Sulawesi Utara : Daerah Perlindungan Laut (DPL) Fenomena antropogenik di terumbu TN Bunaken, Tantangan Konservasi Penyu.

Catatan Materi

- Konservasi merupakan bagian penting dalam isu lingkungan yang membicarakan aspek pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
- Sebagai contoh pengelolaan pesisir dan laut di desa adalah daerah perlindungan laut. Di setiap desa diharapkan memiliki DPL karena DPL memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Dari DPL didapatkan 2 kali hasil tangkapan dan berdasarkan riset dengan adanya DPL dapat memberikan hasil ikan 2 kali lipat dibanding dengan tidak adanya DPL.
- Berdasarkan riset, jika aktivitas manusia tinggi maka akan di temukan perkembangan hama. Ikan-ikan memakan hama pada usia kecil dan ikan mengontrol keseimbangan.
- DPL menjadi sangat penting bagi masyarakat pesisir dan jika dibuka secara bebas maka dipercaya akan datang wabah.
- Contoh studi di Talaud, di sana masyarakat tidak paham mengenai penyu di lindungi. Sedangkan di dunia ada 7 jenis penyu, 6 diantaranya ada di Indonesia. Penyu memerlukan 20-30 tahun untuk menetas telur pertama, pertahanan sangat lemah, saat bertelur tidak berdaya. Penyu harus bertelur di tempat asal, jika tidak telurnya akan busuk.
- Talaud sebenarnya disebut sebagai pulau penyu karena hampir setiap desa ada tempat bertelur penyu. Berburu dan mengkonsumsi penyu adalah budaya buruk masyarakat pesisir
- Oleh karena itu, permasalahan konservasi baik kawasan maupun satwa liarnya menjadi tanggung jawab bersama

Catatan Diskusi

- Tantangan yang dihadapi di desa adalah perencanaan dan konsep untuk membangun lingkungan, sebab pada kenyataannya khususnya Minahasa Utara masih sedikit sekali desa membuat perencanaan lingkungan.
- Contoh baik di Desa Bahoi tidak pernah meninggalkan isu lingkungan dalam perencanaan desa dan kehadiran LSM sangat membantu
- Di suatu desa sudah ada PERDES namun biasanya yang menaati hanya warga desa tersebut, sedangkan di luar desa tersebut kadang tidak mematuhi
- Pada tataran kebijakan, tahapan perencanaan menjadi kunci. Karena di dalamnya akan terjadi internalisasi tentang kegiatan-kegiatan konservasi di desa. Sudah ada ruang cukup kepada kegiatan di desa dan kegiatan apa yang bisa dilakukan di desa
- Perlu zonasi yang jelas, termasuk wilayah kelola masyarakat sekitar, secara khusus perlu memperhatikan wilayah laut yang telah rusak dapat diperbaiki atau dilindungi sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.
- Perlu melibatkan budayawan dan sosiolog. Bagaimana kita berkolaborasi dengan mereka. Seharusnya sosiolog/budayaan kedepannya dapat diundang dan melibatkan mereka.
- Dengan sumberdaya yang terbatas, kita perlu memilih medan yang menjadi target. Perlu bantuan rekan-rekan yang berkecimpung di bidang-bidang strategis lainnya untuk bekerja di desa, misal kita tidak punya sumberdaya untuk advokasi tambang.

- Jika tidak ada DPL masyarakat menangkap ikan lebih jauh, bahan bakar digunakan semakin banyak sehingga meningkatkan emisi karbon. Sebaliknya, jika ada DPL masyarakat tidak perlu jauh mencari ikan dan akan terjadi penghematan bahan bakar sehingga mengurangi emisi.
- Tempat bertelur penyu dapat diakomodir dengan memasukkan area bertelur ke dalam DPL.



Photo 3 Pemaparan Materi oleh Konsorsium Mitra Bahari dan DKP Provinsi Sulawesi Utara



Photo 4 Pemaparan materi oleh FPIK Universitas Sam Ratulangi



Photo 5 Presentasi Materi oleh YAPEKA

9. PEMBAGIAN KELOMPOK DAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*

Pada akhir sesi workshop tersebut dilakukan *focus group discussion* yang dipandu oleh Fasilitator untuk membahas berbagai tantangan dan strategi yang dapat dilakukan guna memperkuat pengelolaan pesisir dan laut di Sulawesi Utara. Tidak mudah untuk mencapainya, sehingga dibutuhkan peran para pihak tentunya.

Peserta dibagi menjadi dua kelompok sesuai dengan letak geografis tempat dimana mereka berkegiatan, yaitu di pulau utama di Sulawesi Utara (Kelompok I) dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara (Kelompok II). Kelompok kemudian diberikan bahan diskusi berupa :

1. Apa tantangan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Sulawesi Utara?
2. Bagaimana strategi menghadapi tantangan tersebut?
3. Siapa saja lembaga yang bergerak diisu pesisir dan laut serta apa kegiatan yang dilakukan?

10. HASIL DISKUSI KELOMPOK

Kelompok yang dibagi dua tersebut membahas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pesisir dan laut di Sulawesi Utara serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Berikut ini gambaran lebih lanjut terkait diskusi yang ada di kedua kelompok :

10.1 Kelompok I (Pulau utama)

10.1.1. Tantangan

- Sudah ada Dana Desa namun alokasi dana dikontrol “paksa” oleh kabupaten. Dengan kondisi tersebut perlu adanya pemetaan partisipatif dan penguatan mengenai regulasi.
- Kebijakan berupa perdes, perda penataan desa sangat dibutuhkan ditingkat bawah. Oleh karena itu diperlukan pendampingan di tingkat desa
- Satu pintu di desa, BUMDES sesuai dokumen RPJMDes/ RKP Des
- Otonomi dalam pengelolaan pesisir/laut, termasuk dalam perlindungan bakau/ mangrove.
- Pembagian wewenang antara Provinsi – Kabupaten sudah dijelaskan dalam UU. Namun dalam wilayah pesisir/laut, aturan yang saat ini dalam RZWP3K masih di pansas dan belum ada KLHS. RZWP3K ditargetkan akan ditetapkan tahun 2016 untuk 4 kabupaten/ kota .

10.1.2. Strategi

- Koordinasi melalui DKP Provinsi untuk menjembatani hingga ke tingkat bawah terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh para pihak.
- Melalui wadah Konsorsium Mitra Bahari dapat berpartisipasi dan koordinasi. Sifat Mitra Bahari adalah voluntary sehingga berbagai kalangan yang punya visi dan misi dalam isu pesisir dapat bergabung di dalam Konsorsium Mitra Bahari Sulawesi Utara



Photo 6 Peserta diskusi kelompok I

10.2. Kelompok II (Pulau-pulau kecil)

10.2.1. Tantangan

- Pemerintah
 - Pelimpahan kewenangan pusat ke provinsi dan provinsi ke kabupaten yang kurang.
 - Saat ini telah ada Perda, namun Perda tersebut tidak mengakomodir kebutuhan nelayan.
 - Pemerintah menetapkan aturan tentang satwa/spesies dilindungi namun sosialisasi kebijakan (spesies) yang belum sampai ke masyarakat.
 - Komitmen Pemerintah belum kuat.
 - Masih terjadi ego sektoral dalam tarik menarik kewenangan.
 - Kurangnya kontrol/ pengawasan yang kurang terhadap persoalan pesisir dan laut.
 - Lemahnya penegakan hukum (tebang pilih).
 - Sangihe dan Talaud belum masuk dalam kawasan konservasi penting di Sulut.
- Universitas
 - Hasil studi masih bersifat pemenuhan akademik, kurangnya hasil studi yang aplikatif.
 - Akses informasi/ data ke publik terbatas.
- NGO/Yayasan/LSM.
 - Masih terjadi ego program/ lembaga.
 - Kegiatan yang dilakukan cenderung jalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi dengan baik.
 - Komunikasi yang kurang membangun kesadaran.
 - Program yang dilakukan cenderung tidak berkelanjutan.
 - Banyak LSM yang menjadikan masyarakat sebagai objek.
 - LSM juga kurang koordinasi dengan stakeholder.
 - LSM belum mengolah kearifan lokal dalam praktek konservasi.
- Desa
 - Di desa ada kecenderungan “penokohan” di tingkat masyarakat
 - Pengetahuan dan pemahaman tentang SDA masih kurang.
 - Belum ada tata ruang wilayah desa (tata ruang desa belum diatur/ dilaksanakan dengan baik).
 - Otonomi desa masih belum optimal.
 - Perencanaan pembangunan desa masih didominasi pembangunan fisik, kurang mengakomodir isu lingkungan.
 - Masih kurang menghubungkan kearifan lokal dengan konservasi.
 - Akses data dan informasi ke publik masih kurang.

10.1.2. Strategi

- Kebijakan
 - Membangun koordinasi dengan provinsi (optional).
 - Penguatan peraturan desa.
 - Penguatan kearifan lokal/ kelembagaan (Eha, Seke, Manee).
 - Sinergitas RPJMDes/ RPJM Kab/ RPJM Provinsi.
 - Percepatan, mengawal, pembentukan RZWP3K (mengakomodir pengelolaan daerah pesisir).
 - Merekomendasikan kawasan konservasi (pengelolaan wilayah pesisir).
- Operasional

- Penguatan aparatur desa.
- Membangun koordinasi/ integrasi dengan provinsi.
- Monitoring dan evaluasi multipihak.
- Menentukan skala prioritas dan implementasi.
- Pola kemitraan
 - Berbentuk konsorsium (multipihak) yang saat ini telah di wadahi dalam Konsorsium Mitra Bahari.
 - Memperkuat komunikasi dan koordinasi



Photo 7 Peserta diskusi kelompok II

11. PEMETAAN LEMBAGA DAN KEGIATANNYA

Selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap lembaga-lembaga yang bekerja di Sulawesi Utara terkait dengan isu pesisir dan laut serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Berikut ini gambaran lebih lanjut terkait dengan lembaga dan kegiatan yang dilakukan di Sulawesi Utara :

11.1. Kelompok I (Pulau utama)

No.	LEMBAGA	LOKASI	PROGRAM/ KEGIATAN
1	WCS	Kabupaten Minahasa Utara	DPL (penyegaran dan pembuatan)
		Kabupaten Sitaro	
2	Manengkel Solidaritas	Kota Manado (Bahowo)	<i>Mangrove Park</i> , sekolah pinggir pantai
		Kabupaten Minahasa Utara (Bahoi)	DPL, Sekolah Pinggir pantai
3	WALHI	Wilayah pesisir Sulut	Pemberdayaan masyarakat (resolusi konflik)
4	Rumah Ganesa	Pesisir pantai timur Minahasa	Perlindungan penyu, mangrove dan lamun dengan pelibatan
		Wori (Minahas Utara)	

No.	LEMBAGA	LOKASI	PROGRAM/ KEGIATAN
			masyarakat (<i>community base</i>)
5	YAPEKA	Kabupaten Minahasa Utara (6 desa)	DPL dan ekowisata
6	Burung Indonesia	wilayah pesisir bagian utara	Konservasi jenis (spesies), community development, perlindungan pesisir.
7	Universitas Sam Ratulangi dan Konsorsium Mitra Bahari	Wilayah pesisir Sulut	Sosialisasi dan penguatan kapasitas.
8	Desa Bahoi	Bahoi (Minahasa Utara)	Pengembangan ekowisata Pelestarian mangrove dan terumbu karang.

11.2. Kelompok II (Pulau-pulau kecil)

No.	LEMBAGA	LOKASI	PROGRAM/ KEGIATAN	WAKTU
1	Burung Indonesia	Siau, Sangihe, Talaud	Program WALLACEA (Konservasi Kenakaragaman Hayati)	2015/2016
2	Celebio	Minahasa Utara, Nitaro (Siau)	PERNA : Tata Guna Lahan (penguatan pesisir dan laut)	2014 2017
3	DKP Sangihe	Kab Kepulauan Sangihe	Penerbitan SK Gubernur Sulut mengenai pencadangan kawasan konservasi di Kec. Tatoareng.	2016
PERDA RZWP3K Kab. Kepulauan Sangihe (oleh Gubernur).			2016/2017	
Rehabilitasi ekosistem pesisir.			2016/2017	
Pembangunan PLTS, Desalinasi air laut dan <i>cold storage</i> .				
4	YAPEKA	Minahasa Utara	Penguatan DPL di desa Bahoi, Talise, dan Lihunu. Ekowisata Bahoi.	2013 - 2016
		Sangihe	Perlindungan dugong dan habitatnya.	2016 - 2017
			Pertanian organik	
			Ekowisata. Pengembangan ekonomi masyarakat.	
5	BPM-BD Provinsi Sulut	Sitaro	Pemanfaatandan pengelolaan SDA melalui	Apr-17

No.	LEMBAGA	LOKASI	PROGRAM/ KEGIATAN	WAKTU
			penerapan tata guna di wilayah pantai pesisir	
6	Perkumpulan KELOLA	Kokorotan, Talaud, dan Sangihe	Riset Manee'e	2000-an dan 2016
			OXFAM : manajemen dan penanggulangan bencana	2010 - 2013
			ANTRA : pendampingan nelayan tradisional	2009
7	Sampiri	Tabukan Selatan dan Nusa tabukan (Sangihe).	DPL	2016-2017
			Pelestarian Sahendarumang	
			Pemberdayaan masyarakat	
			Pertanian organik	2015 - 2016
	KOMPAK	Talaud	Pelestarian Sampiri (burung paruh bengkok, sejenis bayan)	2015 - 2016
8	ANTRA (Asosiasi Nelayan Tradisional).	Pesisir Sulut	Penguatan Nelayan	2009 - sampai sekarang
			Kampung Nelayan	
			Advokasi	
			Koperasi	
			UU no. 7 tahun 2016 (on progress)	
9	KOMPAS (Sitaro)	Siau	Penyadartahuan	2016 - 2017
10	WCS	Koridor utara Minahasa Utara-Sitaro- Sangihe	Monitoring Perdagangan satwa	2008 - Sekarang
			DPL	

LEMBAGA	LOKASI	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU
BURUNG INDONESIA	SIAU SAMBIHE TALAUD	Program Wallacea (Konservasi Keagamaan Hutan)	2015/16
CELEBIO	MINUT MITRA (SIAU)	TIRTA GIWA (SIAU) Program Perikanan Laut (PEDANU)	2014-2015 2015-2016
ITP Sigi	KARIF LAMPU	<ul style="list-style-type: none"> PELAKSANAAN KEMERDEKAAN EKOWISATA PELAKSANAAN KEMERDEKAAN EKOWISATA PELAKSANAAN KEMERDEKAAN EKOWISATA 	<ul style="list-style-type: none"> 2014-2015 2015-2016 2016-2017
YIP	MINUT	MINUT - Penguatan	MINUT

Photo 8 Contoh hasil pemetaan lembaga dan kegiatannya untuk pengelolaan pesisir dan laut di Sulawesi Utara

12. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Umum

- Konservasi tidak hanya bisa melarang masyarakat melakukan kegiatan destruktive namun juga harus memberikan alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan pesisir dan laut.
- Saat ini, berdasarkan UU Desa, RPJMDes dibagi menjadi bidang-bidang, disesuaikan dengan kondisi desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, program yang akan dilakukan di desa perlu menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.
- Konsorsium Mitra Bahari, merupakan tempat berkumpul *stakeholder* di Sulawesi Utara. KMB mengangkat isu-isu strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, misalnya (*common properties*, degradasi lingkungan, kemiskinan dan berusaha mencari solusi (teknologi, peraturan dan kebijakan) yang dapat diterapkan
- Berdasarkan hasil riset, DPL memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, misalnya dari hasil tangkapan didapatkan hasil 2x lipat dibanding dengan lokasi yang tidak memiliki DPL. Oleh karena itu keberadaan DPL sangat penting dan diharapkan semua desa di wilayah pesisir dapat membuat DPL.

Kebijakan

- Pada tataran kebijakan, tahapan perencanaan menjadi kunci. Karena di dalamnya akan terjadi internalisasi tentang kegiatan-kegiatan konservasi di desa. Sudah ada ruang cukup kepada kegiatan di desa dan kegiatan apa yang bisa dilakukan di desa

- Saat ini draft RZWP3K sudah ada namun belum disahkan sehingga perlu mendorong percepatan pengesahan RZWP3K sebagai pedoman pengelolaan pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara
- Penguatan kebijakan di tingkat Kabupaten dan Provinsi agar sinkron dengan kebijakan di atasnya

Kerjasama

- Telah banyak lembaga yang melakukan kegiatan pengelolaan pesisir dan laut di wilayah Sulawesi Utara namun masih terkesan sektoral dan belum terintegrasi dengan baik.
- Pola kemitraan saat ini telah ada dan telah mewadahi berbagai stakeholder baik pemerintah, lsm, maupun universitas. Konsorsium Mitra Bahari Sulawesi Utara merupakan wadah yang strategis, termasuk dalam upaya mengawal kebijakan pengelolaan kawasan pesisir dan laut di Sulawesi Utara
- Konsorsium Mitra Bahari bersifat terbuka keanggotaannya sehingga bagi yang memiliki perhatian yang sama tentang pesisir dan laut dapat bergabung dengan Konsorsium Mitra Bahari, termasuk dari kalangan Media.
- Dukungan pendanaan untuk kegiatan di Sulawesi Utara, secara khusus dalam pengelolaan pesisir dan laut masih sangat dibutuhkan, baik untuk pengelolaan kawasan dan spesies target maupun untuk pemberdayaan masyarakatnya.

Lampiran 1.

Agenda Acara Workshop

Waktu	Acara	Narasumber	Keterangan
Senin, 3 Oktober 2016 (H-1)			
Peserta Luar Daerah <i>Check In</i>			
Selasa, 4 Oktober 2016 (Hari I)			
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta		Panitia
08.30 - 08.45	Pembukaan Sambutan Kadis DKP Prov. Sulawesi Utara		Panitia
08.45 - 09.45	Diskusi Panel I		Moderator Mitra Bahari Sulawesi Utara
	Dukungan Kebijakan dan Pelaksanaan Program Pesisir dan Laut termasuk bagaimana pembagian wewenang Provinsi dan Kabupaten yang dijalankan di Sulawesi Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Utara	
	Efektifitas Konservasi Pesisir dan Laut melalui DPL serta Tantangan Pengelolaannya di Sulawesi Utara	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Unsrat	
09.45 - 10.30	Diskusi Tanya Jawab		
10.30 - 11.30	Diskusi Panel II		Moderator Gustaf Mamangkey, P.hD (FPIK Unsrat)
	Peran Mitra Bahari dan Pembelajaran Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Sulawesi Utara	Mitra Bahari Sulawesi Utara	
	Tantangan dan Peluang Pengelolaan Pesisir dan Laut di Sulawesi Utara (Pembelajaran Pengembangan Program Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat)	Perkumpulan YAPEKA	

11.30 12.15	-	Diskusi Tanya Jawab		
12.15 13.15	-	ISHOMA		
13.15 15.30	-	Pembagian Kelompok (3 kelompok) dan Diskusi Terfokus : 1. Tantangan pengelolaan pesisir dan laut, 2. Program apa yang sudah berjalan dan belum berjalan, bagaimana tantangan pengelolaan pesisir dan laut, 3. Strategi pengelolaan pesisir dan laut		Fasilitator Nano Sudarno (YAPEKA)
15.30- 16.30		Pemaparan Kelompok I dan II		
16.30 17.00	-	Rumusan isu		Peserta
17.00 17.15	-	Penutupan Burung Indonesia/CEPF		Panitia
Rabu, 5 Oktober 2016 (H 2)				
Peserta Luar Daerah <i>Check Out</i>				

Lampiran 2.

Sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulut

SAMBUTAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA PADA WORKSHOP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT DI SULAWESI UTARA:

HARI/TGL : SELASA, 4 OKTOBER 2016

TEMPAT : HOTEL WHIZ MANADO

- YTH. :
- KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA ATAU YANG MEWAKILI
 - KEPALA BAPPEDA KABUPATEN/KOTA ATAU YANG MEWAKILI
 - DEKAN FPIK UNSRAT
 - POLITEHNIK NUSA UTARA
 - PIMPINAN YAYASAN YAPEKA
 - LSM WCS, WWF, CELEBIO, MANENKEL, BI, CEPF
 - DAN UNDANGAN SEKALIAN.

***SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN,
ASSALAMU'ALAIKUM WARRAHMATULAH
WABARAKATU***

SEBAGAI INSAN YANG BERIMAN, SAYA MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEPADA TUHAN YANG MAHA KUASA, ATAS KASIH DAN KEMURAHAN-

UNTUK MENJAMIN KESINAMBUNGAN SUMBER DAYA YANG ADA UNTUK MASA DEPAN.

SALAH SATU CARA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YAITU LEWAT PEMAHAMAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DENGAN HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN TELAH MENDORONG ADANYA PENATAAN KEMBALI PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BEBERAPA OBJEK PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN YAITU PENCEMARAN PERAIRAN, PASIR LAUT DAN TERUMBU KARANG, EKOSISTEM PERAIRAN, KONSERVASI KAWASAN, JENIS DAN GENETIKA, WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, YANG UMUMNYA HARUS DIPERHATIKAN ADALAH PENCEMARAN (LIMBAH RUMAH TANGGA/SAMPAH), PENAMBANGAN KARANG,

NYALAH, SEHINGGA KITA DAPAT BERTEMU DALAM SUASANA YANG INDAH INI UNTUK MENGIKUTI **WORKSHOP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT DI SULAWESI UTARA** YANG DISELENGGARAKAN PADA HARI INI.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MERUPAKAN SALAH SATU PENYUMBANG DEVISA NEGARA APABILA DIKELOLA DENGAN BAIK. UNTUK MEWUJUDKAN HAL TERSEBUT DIPERLUKAN KESAMAAN POLA PIKIR DAN POLA TINDAK YANG TERINTEGRASI DARI SEMUA PIHAK DALAM MEWUJUDKAN KEBIJAKAN LINTAS SEKTORAL UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

KEGIATAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. HAL INI

PENGAMBILAN MANGROVE TANPA TERKENDALI, PENANGKAPAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI, DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. SELAIN ITU JUGA BEBERAPA KEGIATAN LAIN YAITU KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BOM DAN RACUN SERTA PENGGUNAAN LISTRIK MASIH SERING TERJADI SEBAGAIMANA LAPORAN DARI KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS).

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TELAH MELAKUKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MELALUI PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK MENGATUR PEMANFAATAN RUANG DAN MENGHINDARI KONFLIK PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL TERMASUK DALAM PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI DI BEBERAPA DAERAH.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2007 jo UU NO 1 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL, TELAH DIUPAYAKAN PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL DI SULAWESI UTARA DAN
AMANAT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH DIANTARANYA DIATUR
KEWENANGAN WILAYAH PERAIRAN 0 – 14 MIL
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
PEMERINTAH AKAN TERUS BERUPAYA
MEMPERHATIKAN BAGI MASYARAKAT DAN LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT YANG DENGAN SUKARELA
MELAKUKAN PELESTARIAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DENGAN MEMBERIKAN STIMULAN. MARI KITA
WUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

SECARA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

DEMIKIAN SAMBUTAN SAYA DAN SEMOGA
MELALUI KEGIATAN INI KITA DAPAT MANFAATNYA
UNTUK KESEJAHTERAAN KITA SEMUA.

TUHAN SENANTIASA MEMBERKATI KITA SEMUA.
PAKATUAN WO PAKALAWIREN.
WASSALAMU'ALAEKUM WARRAHMATULAH
WABARAKATU

**KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Ir. RONALD T. H. SORONGAN, M.Si

Lampiran 3

Daftar Hadir Peserta



DAFTAR HADIR

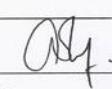
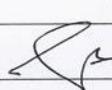


Agenda : Konservasi dan tantangannya dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Sulawesi Utara
 Tanggal : Manado, 04 Oktober 2016

NO.	NAMA	INSTANSI / NO. HP	TANDA TANGAN
1.	Jimmy R. Rando	082343104303 PMD PROVINSI	Manado
2.	Andi Faisal Alwi	BURUNG INDONESIA 0811975 035	
3.	Adi Widyanto	0815 1141 6770	
4.	MARTINI MAKARUNGGANA	CELEBIO 085256743600	Manado
5.	Akbar A. Digo	Yapeka 0811 2533 000	
6.	Maxi Lelindung	KPPD / Binaoi 085240762872	Minut
7.	Daud Jahero	Kepala Desa 0813 46208000	Minut
8.	AGUSTINUS W.	YAPEKA/08112503952	

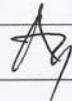
Agenda : Konservasi dan tantangannya dalam pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Laut di Sulawesi Utara

Tanggal : Manado, 04 Oktober 2016

NO.	NAMA	INSTANSI / NO. HP	TANDA TANGAN
9	Ami R. Putriraya .	YAPEKA	
		081519151214 / 082216805550	
10	Dian AGISTA	BURUNG INDONESIA 081511607355	
11	Pony Buz	Kompas.com 081256510522	 Manado
12	Samsud B. Barukun	Samsud 081356087477	 Sangihe
13	Condy Mamas	FPIK- VNSRAT 081236772677	 Manado Moderator
14	Ivonne Takandun	081244281643 DKP Sangihe	 Sangihe
15	Viando. Manarisip	Manarisip Salibitris 085656371881	 Manado
16	R.M. Sanduk.	DKP Sulut 08152412826	 Manado Narim

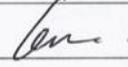
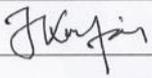
Agenda : Konservasi dan tantangannya dalam pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Laut di Sulawesi Utara

Tanggal : Manado, 04 Oktober 2016

NO.	NAMA	INSTANSI / NO. HP	TANDA TANGAN
17	Konno Srdaruo	or YAPEKA	
		081349731213	
18	Mercy Rampungan	UNIMA / 08249337949	 Mersahba K. Kaul Manado
19	Joy Kumaat	Mitra Bahari	Joy K. Manado Makassar
20	THEMMY DOALY	PROGAT BAY	 Manado
21	Audy DREN	Dep Sultur	 Manado
22	ATINDA	BURUNG INDONESIA	
23	PERRI A. WINOWOPA	DKP - TALAVD	 Takud
		081340684110.	
24	Muhammad Afif	KELOLA	
		087778169286	

Agenda : Konservasi dan tantangannya dalam pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Laut di Sulawesi Utara

Tanggal : Manado, 04 Oktober 2016

NO.	NAMA	INSTANSI / NO. HP	TANDA TANGAN
25.	Sonny J	WCS 08114342206	 Manado
26	Letreny Petit	002192639900 Wahisulut.	 Manado
27	Topix Baranah	Bahoi-08128245976	 MINUT
28	IVAN KOROMPIS	Rumah Ganeca 081340139669	 Manado
29	Rajina Rumarata	Rumah Ganeca 085397712353	 Manado
30	NIXON LUNOKANO	BARBERA 081341180002	 Manado
31	RONALDO MARCUS	MEDIA EXPOSE MANADO	 MANADO
32	Edwin Walukow	KONSULTAN WCS 08124421760	 MANADO
33	Muhammad Arief	Notlens 085260011460	

Media coverage

<http://manado.tribunnews.com/2016/10/04/wijayanto-sebut-potensi-laut-sulut-belum-dikelola-dengan-baik>

Tribun Manado Jumat, 28 Oktober 2016 Netwo

Home News Manado Boulevard Square Bitung Tomohon Minahasa B

Home » Manado

Wijayanto Sebut Potensi Laut Sulut Belum Dikelola Dengan Baik

Selasa, 4 Oktober 2016 21:26



Workshop Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut di Sulawesi Utara, Selasa (4/10)

Aerofans Inn
Rp 165.289
PESAN

Sky Hotel Jojja
Rp 185.950
PESAN

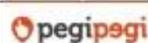
Hotel Elizabeth
Rp 144.628
PESAN

Laporan Wartawan Tribun Manado Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi (Yapeka) bersama Burung Indonesia, Program Wallacea dan CEPF menggelar Workshop Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut di Sulawesi Utara, Selasa (4/10) di Hotel Whiz Prime Megamas.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah, organisasi kemasyarakatan akademisi dan pihak lainnya. Agustinus Wijayanto, panitia dari Yapeka menjelaskan kegiatan ini berlatar belakang wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan.

"Sektor perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan dan strategis terutama di Sulut. Sulut sendiri merupakan daerah yang unik dan salah satu wilayah yang disebut garis Wallacea karena memiliki flora dan fauna yang khas. Kekayaan ini menjadikan Sulut tempat wisata," terangnya.



Namun sayangnya, lanjut Wijayanto, semua potensi ini belum terkelola dengan baik dalam upaya mensejahterakan masyarakat pesisir.

Banyak kendala yang dihadapi Sulut termasuk illegal fishing, pencemaran laut maupun destructive fishing. Ditambah lagi dengan degradasi kawasan pesisir, semisal berkurangnya mangrove, padang lamun, maupun rusaknya terumbu karang.



Aerofans Inn
Rp 165.289
PESAN



Sky Hotel Jogja
Rp 185.950
PESAN



Hotel Elizabeth
Rp 144.628
PESAN



pegipegi

"Saat ini Sulut telah ada wadah kemitraan untuk isu pesisir dan laut guna mengakomodir berbagai pihak yang berkecimpung di ranah tersebut. Namun demikian keberadaan wadah tersebut dalam mendorong program pesisir masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu diperlukan terobosan dan langkah gerak secara terintegrasi antar sektor untuk mengurangi ancaman dan mendorong terwujudnya pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan di Sulut," terangnya.

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut, dalam workshop ini para peserta usai mendapat materi dari Dinas Kelautan dan Provinsi Sulut, Fakultas Perikanan dan Kelautan Unsrat, Mitra Bahari Sulut dan Yapeka sendiri, lalu berdiskusi untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut.

Dari diskusi ini, peserta melahirkan rekomendasi bagi pihak terkait agar ditindak lanjuti. Agar pengelolaan potensi laut di Sulut lebih maksimal, berbagai permasalahan laut dapat teratasi, serta masyarakat pesisir lebih sejahteraan.

Penulis: Finneke_Wolajan

Editor: Susanto_Amisan

Sumber: Tribun Manado